

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, Shandi Patria. “*Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*”, Jurnal Cepalo 3, No. 1 (2019): 1-10.
- Alfauzi, Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi. “*Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi*”, Jurnal Politica 7, No. 2 (2020)
- Ansori, Lutfil. “*Reformasi Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Yuridis 4, No 2 (2017)
- Ardiwan, Dapit Dan Faisal A. Rani. “*Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat-Syarat Kepala Desa*”, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan 3, No. 3 (2019): 322-335.
- Asshiddiqie, Jimly. “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*” (2011)
- “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid II*”. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Baehaqi, Ja'far. “*Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi 10, No 3 (2013)
- Barnett, Hilaire. 2002. *Constitutional & Administrative Law*. London-Sydney: Candevish Publishing Ltd.
- Bhakti, Teguh Satya. “*Politik Hukum Dalam Putusan Hakim*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, No 1 (2016) :53-72.
- Bidja, Isnanto. “*Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal Media Hukum 1, (2015): 1-22.
- Darmadi, Nanang Sri Darmadi. “*Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Hukum XXVIII, No. 2 (2012): 1088-1108.
- Hamzani1, Achmad Irwan , Mukhidin Dan Havis Aravik, “*Cita Hukum Pancasila Di Antara Pluralitas Hukum Nasional*”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental, 2019
- Hutton, Christoper. *Language, Meaning, and the law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009
- I Gede Yusa dkk. 2016. “*Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945*”. Malang: Setara Press.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Khalid, Afif. “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”, Jurnal Al' Adl VI, No11 (2014)
- Kristiyanto, Eko Noer. “*Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif (The Urgency of Omnibus Law to Accelerate Regulatory Reform in The Perspective of Progressive Law)*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, No 2 (2020)
- Labolo, Muhadam. “*Peluang Dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 7, NO. 2 , (2017): 73-84.

- Loewenstein, Karl. 1965. *Political Power and the Governmental Process*. Chicago: University of Chicago Press.
- Logemann, J.H.A. 1975. *Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*. Universitaire Pers Leiden, 1948, Terjemahan Makkatutu dan Pengkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Luthfy, Riza Multazam. “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 4 (2019): 319-330.
- Mahfuz, Abdul Latif. “Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, No 1 (2019) : 43-57.
- Maslul, Syaifullahil. “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021” *Jurnal Literasi Hukum* 6, No. 2 (2022)
- MD, Moh. Mahfud. 2010. “Membangun politik hukum menegakkan konstitusi”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. “Arus Pemikiran Konstitusionalisme seri Tata Negara” Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Nurdiansah, Muhamad Andre. “Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, No. 1 (2023)
- Nuryadi, Deni. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, No 2 (2016)
- Nuryadi, M. Yusrizal Adi. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Mercatoria* 4, No 2 (2011)
- Pakaya, Jefri S. “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No 1, (2016): 73-82.
- Pambudhi, Hario Danang. “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”, *Jurnal Wijaya Putra Law Review* 2, No. 1 (2023)
- Patterson, Dennis. “*Interpretation In Law*”. Departments Of Law And Philosophy, No 1, 2003.
- Rahman, M. Gazali Dan Sahlan Tomayahu, “Penegakan Hukum Di Indonesia” *Jurnal Al-Himayah* 4, No 1 (2020)
- Ramlan Dan Eka Nam Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media: Medan.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 5 No. 5 (2017): 100-108.
- Strong. C.F. 1966. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson Limited.
- Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum* 7, No 1 (2018)
- Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum”. *Jurnal Moderat* 8. No 2. (2022)
- Swasono, Purna Hadi. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

Tentang Desa)” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019).
Wheare. K.C. 1975. *Modern Constitution*. New York: Oxford University Press.
Widjaja, Haw. 2003. “*Pemerintahan Desa/Marga*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Internet

JDIH Kabupaten Banyuwangi Berita: Mengenai Tugas Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi”, <https://jdih.banyuwangi.go.id/Berita/Detail/Mengenal-Tugas-Dan-Wewenang-Mahkamah-Konstitusi> Diakses Pada Tanggal 18 Agustus Pada Pukul 15.35.
Kementerian Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Jaya Sakti, 2014)
Kepala Desa-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas” http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus Pukul 16.50
Pengertian Penelitian Hukum Normatif.” <https://idtesis.com/Pengertian-Penelitian-Hukum-Normatif-Adalah> Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2022 Pada Pukul 16.09.
Pengertian Putusan” <https://www.google.co.id/> Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2022 Pada Pukul 16.49.
Perpanjangan masa jabatan kepala desa: kebobrokan elit kepemimpinan publik”. <https://www.pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/> diakses pada 1 Oktober 2023 pada pukul 13.45 wita
Sjarifuddin Hasan: kekuasaan yang terlalu lama menyebabkan otoritarian”. <https://www.mpr.go.id/berita/Sjarifuddin-Hasan-Kekuasaan-Yang-Terlalu-Lama-Menyebabkan-Otoritarian> diakses pada 1 Oktober 2023 pada pukul 13.30 wita.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa